



Wali Kota Sebut Yogya Masih Aman

WALI Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menegaskan, situasi dan kondisi wilayahnya tetap aman dan terkendali, meski aksi kejahatan jalanan atau yang akrab disebut *klitih* kerap terjadi akhir-akhir ini.

Oleh sebab itu, dirinya pun berharap wisatawan atau para pe-

mudik yang hendak pulang kampung ke kota pelajar pada masa Lebaran nanti tidak perlu khawatir. Haryadi berani menggaransi, bahwa Kota Yogyakarta tetap aman.

"Tidak perlu takut ke Yog-

● ke halaman 11

Wali Kota

● Sambungan Hal 1

ya. Orang mengatakan Yogya tidak aman. Kata siapa? In-syaallah Yogya aman. Jadi, tidak usah mengkhawatirkan itu," urainya, di sela Rapat Koordinasi Penanganan Kejahatan Jalanan, Selasa (12/4).

Wali Kota menegaskan, selama ini, para pelaku kejahatan jalanan pun tidak asal menasar korbannya. Apalagi, dirinya berujar, pemkot dan aparat kepolisian pun tak akan setengah-setengah meminimalisasi geliat tindakan kriminal.

"Tidak ada korban acak, enggak ada itu, tiba-tiba baru keluar terus kena, pasti ada permulaannya. Kalau salah sasaran, ya, mungkin ada, tapi relatif kecil pasti," ungkapnyanya.

"Tidak usah lebay juga, sampai ada yang memberitakan, ada wisatawan yang *checkout* karena khawatir *klitih*, padahal pulang karena masa sewa habis," imbuh Haryadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, salah satu poin yang

kal digulirkan dalam waktu dekat ialah, patroli rutin lintas instansi. Yakni dengan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Karang Taruna, dan masyarakat. "Tempat-tempat wisata semua dikunjungi juga aman. Jadi, silakan datang ke Yogya. Lagipula kami ada untuk menjaga keamanan dan kenyamanan," pungkasnya.

Rehabilitasi

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi perhatian khusus terhadap fenomena kejahatan jalanan atau *klitih* yang terus berulang di DIY. Raja Keraton Yogyakarta ini menyebut bahwa Pemda DIY tengah menggodok program untuk melakukan pengawasan dan pendampingan bagi anak yang berpotensi maupun telah melakukan tindak kejahatan.

Salah satunya melalui program rehabilitasi khusus anak nakal yang akan memakan tempat di sekitar Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) di Pundong, Bantul. Hal itu dianggap me-

itu tergolong luas.

"Ditata kembali program untuk *training* yang ada di Pundong itu. Coba kita adakan karena tanahnya luas, bagaimana dia (anak nakal) bisa mungkin tinggal di sana," jelas Sultan di Kompleks Kepatihan, Selasa (12/4).

Sultan menjelaskan, sebagian anak dan remaja yang pernah melakukan tindak kriminal hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Selain itu Sultan juga meyakini bahwa anak yang putus sekolah memiliki potensi yang lebih besar untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Misalnya si anak akan mengikuti geng untuk mengisi kesibukannya.

Karenanya, mengeluarkan anak bermasalah dari sekolah bukan merupakan solusi. Perlu upaya pendampingan dan pembinaan secara intens agar anak tak terjerumus melakukan tindak kejahatan.

"Ya, kalau terus nganggur, kriminalitasnya makin tinggi. Kejahatan juga makin tinggi. Lebih baik, bisa enggak ditip-

(pusat rehabilitasi)," ujarnya. "Memberhentikan sekolah enggak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah," sambung Sultan.

Lebih jauh, Sultan menyebut bahwa selama ini Pemda DIY juga telah menampung anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Mereka perlu mendapat pendampingan lantaran orang tuanya tidak lagi mau menerima anaknya.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah diminta melakukan pendampingan. Yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan Dinas Sosial (Dinsos) DIY.

"Nah memang sekarang yang kita *openi* ini (ABH yang ditolak keluarga). Dari kepala dinas mengatakan, karena rata-rata orang tua tidak mau menerima lagi. Karena dia tidak bisa dikendalikan sama ortu atau dasarnya perceraian dan sebagainya. Ini perlu kita dalam supaya dia itu betul-betul bisa berubah," beber Sultan. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

